



Wako Sampaikan KUA-PPAS Perubahan 2025

PONTIANAK, TRIBUN - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kota Pontianak terkait Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

Edi mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pelaporan keuangan, telah berjalan sesuai ketentuan. Hal ini dibuktikan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), yang ke-14 kali secara berturut-turut.

"Pemerintah Kota Pontianak sudah melaksanakan tata kelola pemerintahan, terutama laporan keuangan, dengan sesuai setelah diperiksa oleh BPK. Hasilnya WTP. Jadi ini WTP ke-14 kali kita," ujar Edi kepada tribunpontianak.co.id, Senin 23 Juni 2025.

Selain itu, Edi juga menyampaikan hasil penetapan kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS) perubahan tahun 2025.

"Ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan penghematan oleh Presiden dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru. Meski ada penyesuaian, secara total kita mengalami peningkatan anggaran sebesar 1,09 persen," tambahnya.

Rapat paripurna tersebut merupakan tahapan awal dalam proses evaluasi dan penetapan anggaran yang transparan dan akuntabel untuk tahun mendatang.

Selain itu Edi Kamtono,

mengungkapkan berbagai sumber dana yang menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Ia menyebut SILPA tersebut berasal dari sejumlah pos anggaran yang tidak terserap secara optimal.

"SILPA itu disebabkan karena adanya penghematan, misalnya dari sisa dana lelang, itu fisik ya. Yang kedua, ada anggaran yang besar juga di BOK

■ Bersambung ke hal. 10



TRIBUNPONTIANAK/AYU NADILA

KETERANGAN - Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono saat diwawancarai usai kegiatan Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Pontianak, Senin 23 Juni 2025.

Wako Sampaikan KUA-PP

Sambungan Hal.9

ke puskesmas yang tidak terserap," ujar Edi Kamtono.

Selain itu, dana BOS dari sektor pendidikan juga menyumbang sisa anggaran. "Setelah itu ada dari sisa BOS dana BLUD yang kelebihan, pemasukannya jadi tidak terserap. Terus ada dari pendapatan yang melebihi dari yang direncana-

kan," jelasnya.

Terkait dana hibah, Edi Kamtono menegaskan bahwa terdapat dua kategori utama, yakni hibah rutin dan hibah fisik. "Dana hibah itu pertama, ada yang rutin seperti bantuan untuk PMI, LPTK, PKK, yang ada dasar undang-undangnya. Lalu hibah untuk rumah ibadah

dan pesantren," tuturnya.

Ia menambahkan, Dana hibah juga untuk posyandu dan bantuan fisik seperti inisiasi vertikal. Yang selebihnya adalah bantuan sosial, seperti untuk mahasiswa dan masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pusat seperti BPNT dan PKH. (ayu)